

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

a. Latar Belakang

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BPPP Bitung didirikan pada tahun 1974 dengan nama Training Center (TC) Perikanan. Kemudian pada tahun 1975, TC Perikanan diubah namanya menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Aertembaga. Pada tahun 1978 namanya diubah kembali menjadi Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Aertembaga, dan sejak tahun 2001 nama BKPI Bitung diubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Aertembaga serta pada Tahun 30 Maret 2017 melalui Permen KP No. 27/PERMEN-KP/ 2017 NOMENKLATUR Balai resmi berubah menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung.

Entitas berkedudukan di Jalan Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Selama kurun waktu 42 tahun BPPP Bitung telah 11 (sebelas) kali berganti pemimpin.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi, maka BPPP Bitung menyusun visi yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu “Terwujudnya Sumberdaya Manusia Perikanan yang Terampil dan Mampu Mengelola Usaha Perikanan”. Adapun rumusan Misi BPPP Bitung sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelaksanaan diklat yang profesional dan berkualitas.
2. Mengembangkan aparatur Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung menuju profesionalisme sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Mengembangkan pelatihan sesuai dengan pangsa pasar.
4. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kemajuan teknologi.
6. Menata lingkungan kampus yang bersih, indah dan amanologi.

Sebagai salah satu UPT dari BPPSDM Kelautan dan Perikanan, BPPP Bitung memiliki tugas untuk “Melaksanakan Penyusunan Bahan Kebijakan, Program dan Anggaran, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya BPPP Bitung memegang fungsi sebagai Perencanaan kegiatan pelatihan teknis dan manajerial dibidang kelautan dan perikanan, penyusunan materi metodologi dan penyelenggaraan penyuluh perikanan sesuai kondisi wilayah, pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang kelautan dan perikanan, pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Wilayah pengembangan BPPP Bitung meliputi 7 (tujuh) Provinsi dengan 79 Kabupaten / Kota, yaitu :

1. Provinsi Sulawesi Utara : 4 Kota dan 11 Kabupaten
2. Provinsi Gorontalo: 1 Kota dan 5 Kabupaten
3. Provinsi Sulawesi Tengah: 1 Kota dan 12 Kabupaten
4. Provinsi Sulawesi Selatan : 3 Kota dan 21 Kabupaten

5. Provinsi Kalimantan Timur : 3 Kota dan 7 Kabupaten
6. Provinsi Kalimantan Utara : 1 Kota dan 4 Kabupaten
7. Provinsi Sulawesi Barat : 6 Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPPP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas masing-masing, sebagai berikut :

a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Bitung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Jumlah keseluruhan pegawai BPPP Bitung sampai dengan 30 Juni 2024 sebanyak 437 orang, terdiri dari PNS 269 orang, 58 orang PPPK, 92 orang Penyuluh Perikanan Bantu, PPNNP 2 orang dan tenaga kontrak 16 orang. PNS BPPP Bitung berdasarkan golongan disajikan berikut ini :

PNS BPPP Bitung berdasarkan Golongan

No.	Uraia	Jumla
1	Golongan II	72
2	Golongan III	17
3	Golongan IV	31
	Jumlah	27

PNS BPPP Bitung berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan berikut ini :

**Tabel 2. PNS BPPP Bitung
berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat	Jumlah
1	SLTA	36
2	D3	63
3	S1	14
4	D4	19
5	S2	13
	Jumlah	27

BPPP Bitung memiliki 6 (enam) jabatan fungsional yang siap memberikan bimbingan dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan.

Kelima jabatan fungsional tersebut yaitu :

- Jabatan Fungsional Instruktur
- Jabatan Fungsional Widyaiswara
- Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
- Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan
- Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
- Jabatan Fungsional Perencana

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI full module untuk seluruh K/L pada Tahun 2024, maka pemrosesan transaksi

keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP).

Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016. Dengan penerapan SAKTI full module maka proses bisnis rekonsiliasi mulai Tahun 2022 perlu disesuaikan, yaitu Aplikasi e-Rekon&LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat website <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Bitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan- LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal

neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak	100%

	tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR

atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.+
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(2) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(3) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(4) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan per 31 Desember 2024, Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 DESEMBER 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	188.600.000	
		-
Jumlah Pendapatan	188.600.000	-
Belanja	-	-
Belanja Pegawai	45.146.414.000	47.831.414.000
Belanja Barang	17.065.896.000	16.953.896.000
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Modal	652.900.000	652.900.000
Jumlah Belanja	62.865.210.000	65.438.210.000

Dalam Kegiatan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sampai 31 Desember 2024 telah melakukan Revisi Anggaran, seperti :

- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-1, tanggal 29 Januari 2024, tentang Revisi atas Kode Pengaman (Digital Stamp) rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana.
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-2, tanggal 7 Februari 2024, tentang atas Halaman III DIPA.
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-3, tanggal 16 April 2024, Revisi atas Halaman III DIPA
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-4, tanggal 31 Mei 2024, Revisi atas Halaman III DIPA
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-5, tanggal

12 Juni 2024, Revisi atas Halaman III DIPA

- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-6, tanggal 15 Juli 2024, tentang penyesuaian Halaman III DIPA (Kanwil) dan Pemutakhiran revisi POK (Perubahan pada SCC (Pelatihan))
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-7, tanggal 29 Agustus 2024, tentang Pemutakhiran revisi POK (Perubahan pada SCC (Pelatihan))
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-8, tanggal 1 Oktober 2024, tentang Pemutakhiran revisi POK (Perubahan pada SCC (Pelatihan))
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-9, tanggal 31 Oktober 2024, tentang Pelimpahan anggaran operasional (002) ke Puslat KP sebesar Rp20.000.000,00
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-10, tanggal 5 November 2024, tentang Penambahan anggaran untuk kekurangan belanja pegawai (DJA)
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-11, tanggal 19 November 2024, tentang Penambahan Tagging (Perjalanan Dinas) dan efisiensi anggaran perjalanan dinas di Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-12, tanggal 10 Desember 2024, tentang Pemutakhiran revisi POK (Perubahan pada QDD (Penyuluhan) dan EBA)
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Revisi ke-13, tanggal 27 Desember 2024, tentang Pemutakhiran revisi POK (Perubahan pada QDD (Penyuluhan) dan EBA (Belanja 51)).

B.1 Pendapatan

*Realisasi Pendapatan
Rp579.057.517,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp579.057.517,00 atau mencapai 307 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp188.600,00. Pendapatan Satuan kerja Wilayah lingkup Badan

Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya, Pendapatan sewa Tanah Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI, Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Realisasi Pendapatan		
	Pendapatan	Realisasi	% Real Pendapatan
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan dari Penjualan, Pengeluaran BMN, Iuran Badan Usaha dan	-	-	0,00%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	-	182.696.000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin	-	-	-
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	2.970.500	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	20.000.000	48.850.107	244.25.00
Pendapatan Penggunaan SaranadanPrasarana sesuai dengan TUSI	121.800.000	78.890.000	64.77
Jumlah Penerimaan	141.800.000	313.406.607	101.5
Pendapatan Pendidikan, budaya, Riset dan Teknologi	-	-	0.00.00
Pendapatan Ujian/ Seleksi Masuk Pendidikan	-	-	0
Pendapatan Biaya Pendidikan	0	0	0
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan	46.800.000	237.750.000	508.01
Jumlah Pendapatan	46.800.000	237.750.000	508,01
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	0	-
Jumlah Pendapatan	-	0	-
Pendapatan lain- Lain	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	11.118.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	13.003.610	16.782.910	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	0	-
Jumlah Pendapatan	-	27.900.910	0
Jumlah Keseluruhan Pendapatan	188.600.000	579.057.517	307.03

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 senilai Rp579.057.517,00 pada Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yaitu :

▪ **Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp182.696.000,00, sebagai berikut;**

- Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa penjualan udang vaname senilai Rp13.640.000,00
- Hasil sampling kegiatan workshop budidaya berupa panen ikan lele senilai Rp2.700.000,00
- Hasil praktek budidaya Lele senilai Rp600.000,00
- Hasil praktek budidaya Lele senilai Rp600.000,00
- Hasil sampling kegiatan workshop budidaya berupa panen ikan lele senilai Rp126.000,00
- Hasil sampling kegiatan workshop budidaya berupa penjualan ikan lele senilai Rp30.000,00
- Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa panen udang vaname senilai Rp71.500.000,00
- Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa panen udang vaname senilai Rp34.265.000,00
- Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa panen udang vaname senilai Rp56.430.000,00
- Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa panen udang vaname senilai Rp2.805.000,00

▪ **Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp48.850.107,00, sebagai berikut:**

- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Januari 2024 senilai Rp1.549.548,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Februari 2024 senilai Rp1.549.548,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Maret 2024 senilai Rp1.549.548,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan April 2024 senilai Rp1.549.548,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Mei 2024 senilai Rp1.549.548,00
- Sewa Tanah pemerintah (untuk Food Court) senilai

Rp654.000,00

- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Juni 2024 senilai Rp1.549.548,00
- Pembayaran kekurangan bayar sewa penggunaan rumah negara (rumah dinas) an. Ahmad Ridloudin, dkk senilai Rp8.478.121,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Juli 2024 senilai Rp1.549.548,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Agustus 2024 senilai Rp3.060.438,00
- Sewa Koperasi tahun 2024 dengan bukti setor Billing no. 820240820738463 tanggal 20 Agustus 2024 senilai Rp6.270.625,000
- Kekurangan bayar sewa koperasi dengan bukti setor Billing no. 820240822094862 tanggal 22 Agustus 2024 senilai Rp3.762.375,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan September 2024 senilai Rp2.053.178,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Oktober 2024 senilai Rp2.053.178,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan November 2024 senilai Rp2.053.178,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Desember 2024 senilai Rp2.053.178,00
- Sewa ruang pertemuan dan kamar asrama kegiatan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Bitung dan Kab. Minahasa Utara senilai Rp7.565.000,00

Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp78.890.000,00, sebagai berikut :

- Sewa asrama kegiatan rapat kerja Hidayatullah prov. Sulut tanggal 28 s.d. 30 Januari 2024 senilai

4.800.000,00

- Sewa ruang pertemuan kegiatan rapat kerja Hidayatullah prov. Sulut tanggal 28 s.d. 30 Januari 2024 senilai Rp500.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung senilai Rp325.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 18 Januari 2024 senilai Rp125.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 24 Januari 2024 senilai Rp135.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 28 Januari 2024 senilai Rp45.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 30 Januari 2024 senilai Rp100.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan pelatihan BST F tingkat II tanggal 5 s.d. 7 Februari 2024 senilai Rp 750.000,00
- Sewa ruang pertemuan untuk kegiatan masyarakat tanggal 14 Februari 2024 senilai Rp1.000.000
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 1 Februari 2024 senilai Rp150.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 2 Februari 2024 senilai Rp250.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 3 Februari 2024 senilai Rp50.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 4 Februari 2024 senilai Rp100.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 6 Februari 2024 senilai Rp40.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 9 Februari 2024 senilai Rp100.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 10 Februari 2024 senilai Rp80.000,00

- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 12 Februari 2024 senilai Rp65.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 14 Februari 2024 senilai Rp75.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 17 Februari 2024 senilai Rp100.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 22 Februari 2024 senilai Rp105.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 24 Februari 2024 senilai Rp200.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 3 Maret 2024 senilai Rp195.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 4 Maret 2024 senilai Rp20.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 6 Maret 2024 senilai Rp25.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 9 Maret 2024 senilai Rp125.000,00
- Sewa asrama orang tua Taruna Poltek KP Bitung senilai Rp800.000,00
- Sewa asrama kegiatan Excellent Servant Camp 2024 GPI Kingdom Living Community senilai Rp9.600.000,00
- Sewa aula kegiatan Excellent Servant Camp 2024 GPI Kingdom Living Community senilai Rp1.000.000,00
- Sewa asrama mahasiswa prodi Agrobisnis perikanan FPIK UNSRAT Manado tanggal 22 Mei 2024 senilai Rp4.000.000,
- Sewa asrama masyarakat umum tanggal 11 s.d. 13 Mei 2024 senilai Rp4.000.000,00
- Sewa kamar asrama untuk seleksi PentaruPoltek KP Bitung tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024 senilai Rp640.000,00
- Sewa kamar asrama untuk seleksi PentaruPoltek KP

Bitung senilai Rp1.840.000,00

- Sewa aula kegiatan Bible Camp remaja jemaat Sentrum bitung senilai Rp1.000.000,00
- Sewa asrama kegiatan Bible Camp Remaja Jemaat Sentrum Bitung tanggal Rp4.000.000,00
- Sewa aula kegiatan Pelatihan offline Kab/Kota HAM Bitung Tgl. 3-5 Juli 2024 senilai Rp3.000.000,00
- Sewa asrama kegiatan Pelatihan offline Kab/Kota HAM Bitung Tgl. 3 Juli 2024 senilai Rp320.000,00
- Sewa asrama kegiatan Pelatihan offline Kab/Kota HAM Bitung Tgl. 3-5 Juli 2024 senilai Rp2.720.000,00
- Sewa asrama orang tua calon taruna Poltek KP Bitung Tgl 15 Juli 2024 (10 org x Rp. 80.000) senilai Rp800.000,00
- Sewa asrama penerimaan calon taruna Poltek KP Bitung Tgl 15 Juli 2024 (23 org x Rp40.000,00) senilai Rp920.000,00
- Sewa asrama Taruna Poltek KP Bitung tanggal 19 sd 24 Juli 2024 senilai Rp 800.000,00
- Sewa asrama Taruna Poltek KP Bitung tanggal 20 sd 24 Juli 2024 senilai Rp 160.000,00
- Sewa asrama Taruna Poltek KP Bitung tanggal 21 sd 24 Juli 2024 senilai Rp 120.000,00
- Sewa asrama Taruna Poltek KP Bitung tanggal 22 sd 24 Juli 2024 senilai Rp 80.000,00
- Sewa asrama pelatihan Festival HAM tanggal 25 sd 29 Juli 2024 senilai Rp7.680.000,00
- Sewa aula pelatihan Festival HAM senilai Rp3.000.000,00
- Sewa kamar asrama untuk 10 orang pendata Tgl. 31 Juli sd 2 Agustus 2024 (10 org x 3 hr x Rp. 80.000) senilai Rp2.400.000,00
- Sewa ruang kelas dan asrama untuk kegiatan pelatihan

Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan di BPPP Bitung kerjasama dengan Diskan Kab. Mimika senilai Rp3.900.000,00

- Sewa kamar asrama untuk 7 orang tanggal 2 September 2024 senilai Rp 560.000,00
- Sewa kamar asrama peserta pelat. Dan sertifikasi pembenihan ikan di BPPP Bitung kerjasama dgn Polnustar Tgl. 17 sd 19 September 2024 (5 org (siswa) senilai Rp600.000,00
- Sewa kamar asrama peserta pelat. Dan sertifikasi pembenihan ikan di BPPP Bitung kerjasama dgn Polnustar Tgl. 17 sd 19 September 2024 (4 org (dosen) senilai Rp960.000,00
- Sewa ruang kelas peserta pelat. Dan sertifikasi pembenihan ikan di BPPP Bitung kerjasama dgn Polnustar Tgl. 17 sd 19 September 2024 senilai Rp1.000.000,00
- Sewa ruang kelas kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan Mahasiswa Politeknik Nusa Utara Tgl. 7 sd 10 Oktober 2024 senilai Rp 750.000,00
- Sewa kamar asrama kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan Mahasiswa Politeknik Nusa Utara Tgl. 7 sd 10 Oktober 2024 senilai Rp1.440.000,00
- Sewa kamar asrama kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan Mahasiswa Politeknik Nusa Utara Tgl. 7 sd 10 Oktober 2024 (1 orang dosen) senilai Rp240.000,00
- Sewa ruang pertemuan / aula kegiatan field trip siswa lower class SD Citra Kasih Manado Tgl. 20 November 2024 senilai Rp1.000.000,00
- Sewa ruang pertemuan / aula kegiatan field trip siswa

lower class SD Citra Kasih Manado Tgl. 21 November 2024 senilai Rp1.000.000,00

- Sewa asrama kegiatan pelatihan BSTF sebanyak 30 org Tgl 2-6 Des 2024 senilai Rp9.600.000,00
- Sewa ruang kelas kegiatan pelatihan BSTF Tgl. 3-5 Des 2024 senilai Rp1.500.000,00

Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan senilai Rp237.750,00, sebagai berikut :

- Ujian upgrading ankapin/ atkapin III senilai 13.650.000,00
- Diklat Upgrading SKK 60 Mil ankapin/ atkapin II senilai Rp28.700.000,00
- Pelatihan BST Fisheries tingkat II di Minahasa Tenggara tanggal 14 s.d. 16 Mei 2024 senilai Rp14.400.000,00
- Biaya pelatihan BST Fisherie tingkat II senilai Rp1.800.000,00
- Biaya pelatihan BST Fisherie tingkat II senilai Rp16.200.000,00
- Pelatihan BST Fisheries tingkat II di BPPP Bitung tanggal 5 s.d. 7 Februari 2024 senilai Rp18.000.000,00
- Pelatihan BST Fisheries tingkat II di Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 14 s.d. 16 Mei 2024 senilai Rp14.400.000,00
- Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran produk hasil perikanan di BPPP Bitung kerjasama dengan Diskan Kabupaten Mimika senilai Rp9.900.000,00
- Pelatihan Pembenihan Ikan di BPPP Bitung kerjasama dengan Politeknik Negeri Nusa Utara tanggal 17 sd 18 September 2024 senilai Rp5.940.000,00
- Uji Kompetensi Pelatihan Pembenihan Ikan di BPPP Bitung kerjasama dengan Politeknik Negeri Nusa Utara tanggal 19 September 2024 senilai Rp4.770.000,00
- Uji Kompetensi Pelatihan Pembenihan Ikan di BPPP

Bitung kerjasama dengan Politeknik Negeri Nusa Utara tanggal 19 September 2024 senilai Rp4.770.000,00

- Sertifikasi/ TUK Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan mahasiswa politeknik Nusa Utara Rp6.360.000,00
- Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan mahasiswa Politeknik Nusa Utara senilai Rp11.880.000,00
- Kegiatan Pelatihan BSTF Tgl. 7 sd 9 November 2024 senilai Rp7.800.000,00
- Pelatihan upgrading SKK 60 Mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 22 orang Tgl. 11 sd 14 November 2024 senilai Rp18.040.000,00
- Ujian upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 22 orang senilai Rp8.580.000,00
- Pelatihan upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 6 org Tgl. 11 - 14 Nov. 2024 senilai Rp4.920.000,00
- Ujian upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 6 org senilai Rp2.340.000,00
- Pelatihan upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 4 org senilai Rp3.280.000,00
- Ujian upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 4 org senilai Rp1.560.000,00
- Kegiatan Pelatihan BSTF II untuk 23 orang Tgl. 18 sd 20 November 2024 senilai Rp13.800.000,00
- Pelatihan upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III untuk 23 orang Tgl. 21 sd 23 November 2024 senilai Rp18.860.000,00
- Biaya ujian upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III untuk 23 orang Tgl. 24 November 2024 senilai Rp8.970.000,00
- Kegiatan Pelatihan BSTF II untuk 30 orang Tgl. 3 - 5

Desember 2024 senilai Rp18.000.000,00

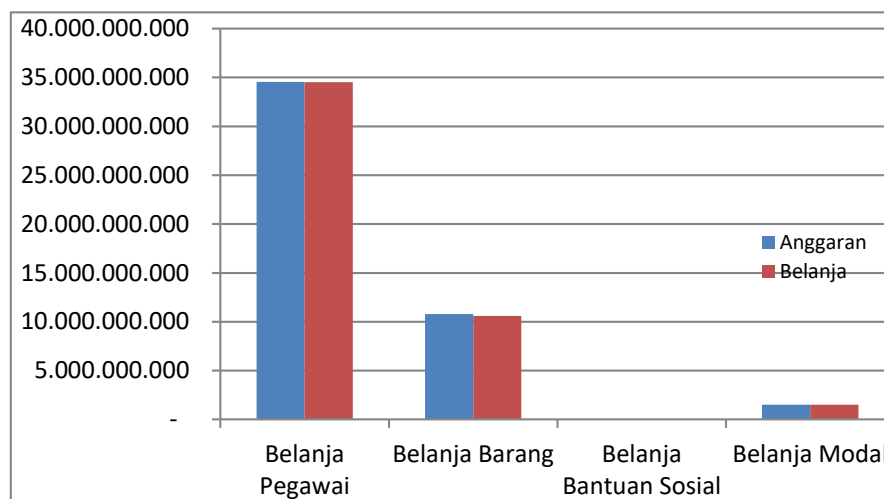
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya senilai Rp2.970.500,00, sebagai berikut;

- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa Bakso Ikan Tuna senilai Rp52.500,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa Bakso Ikan Tuna senilai Rp410.000,00
- Hasil penjualan pempek senilai Rp400.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa snack rumput laut senilai Rp49.500,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa pempek senilai Rp250.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop Pengolahan berupa olahan mie rumput laut senilai Rp150.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop Pengolahan berupa pempek telur senilai Rp350.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa bakso ikan senilai Rp35.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan mie rumput laut senilai Rp60.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan bakso ikan senilai Rp35.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan mie rumput laut senilai Rp30.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan bakso ikan tuna senilai Rp52.500,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan bakso ikan senilai Rp52.500,00
- Hasil samping kegiatan WS PHP berupa pempek ikan senilai Rp75.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan bakso ikan senilai Rp35.000,00

- Hasil sampling kegiatan workshop PHP berupa risol tuna senilai Rp99.000,00
- Hasil sampling kegiatan workshop PHP berupa bakso ikan senilai Rp42.000,00
- Hasil sampling kegiatan workshop PHP berupa nugget ikan senilai Rp38.000,00
- Hasil sampling kegiatan workshop PHP berupa bakso ikan senilai Rp175.000,00
- **Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp11.118.000,00, sebagai berikut:**
 - Uang Makan bulan November 2023 an. Rian Hidayat Luhkan Kaltara senilai Rp770.000,00
 - Tunjangan fungsional April s.d. Desember 2023 dan Tunjangan Kinerja Sept 2023 an. Adi Saputra (Tugas Belajar) senilai Rp2.344.200
 - Pengembalian Belanja Pegawai TAYL (Tunjangan Umum an. Fiqi Zulendra) senilai Rp370.000,00
 - Pengembalian pembayaran tunjangan Fungsional April 2023 Gaji THR 2023 dan Tunj. Umum bulan Mei 2023 (Gaji 13 2023) an Adi Saputra senilai Rp1.145.000
 - Pengembalian Kelebihan Bayar tunjangan kinerja bulan September 2022 sd Desember 2023 an Adi Saputra senilai Rp6.488.800,00
- **Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp16.782.910,00 , sebagai berikut:**
 - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp13.003.610
 - Pengembalian Kelebihan Bayar pekerjaan pemeliharaan bangunan bengkel/ hangar permanen oleh CV. Carin Jaya senilai Rp2.675.700,00
 - Pengembalian Kelebihan Bayar pekerjaan pemeliharaan

gedung instalasi studio oleh Rp1.103.600,00

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami Kenaikan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Kenaikan pada belanja Pegawai pada Tahun 2024
2. Adanya penambahan anggaran

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	25.507.335.085	21.166.909.342	20,51
Belanja Barang	7.667.460.972	4.774.946.486	60,58
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	462.892.333	416.200.983	11,22
Jumlah	33.637.688.390	26.358.056.811	27,62

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp47.822.555.391,00

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp47.822.555.391,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	14.093.320.600	13.340.712.580	5,64
Belanja Pembulatan Gaji PNS	213.931	200.184	6,87
Bel. Tunj. Suami/ istri PNS	933.919.810	873.927.150	6,86
Bel. Tunj. Anak	275.572.862	261.634.662	5,33
Bel. Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.740.000	(2,10)
Bel. Tunj. Fungsional PNS	2.558.878.000	2.596.762.000	(1,46)
Bel Tunj. PPh PNS	164.858.908	71.101.202	131,87
Bel. Tunj. Beras PNS	725.069.040	749.112.480	(3,21)
Bel. Uang Makan PNS	2.240.417.000	2.359.149.000	(5,03)
Bel. Tunj. Umum PNS	49.700.000	59.825.000	(16,92)
Bel. Pegawai (Tunj. Profesi Dosen)			-
Belanja Gaji Pokok PPPK	2.122.955.600	1.153.968.500	83,97
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	41.586	28.585	45,48
Bel. Tunj. Suami/ istri PPPK	130.796.720	70.899.350	84,48
Bel. Tunj. Anak PPPK	34.980.128	16.256.420	115,18
Bel. Tunj. Fungsional PPPK	342.360.000	210.060.000	62,98
Bel. Tunj. Beras PPPK	117.537.660	65.322.840	79,93
Bel. Uang Makan PPPK	373.683.000	228.697.000	63,40
Belanja Uang Lembur			-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan)	20.853.241.548	19.000.242.849	9,75
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan/Kinerja PPPK)	2.784.818.863	1.667.946.170	66,96
Jumlah	47.827.565.256	42.751.585.972	11,87
Pengembalian Belanja	5.009.865	3.319.845	50,91
Jumlah	47.822.555.391	42.748.266.127	11,87

Dalam Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 terdapat Pengembalian Belanja pada satuan kerja Balai Pelatihan dan penyuluhan Perikanan Bitung senilai Rp5.009.865,00. yaitu:

- Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp6.852,00.

- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS senilai Rp1.665.841,00
- Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) senilai Rp3.175.172,00.
- Pengembalian Uang Makan PNS senilai Rp162.000,00

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp14.542.982.367,00

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp14.542.982.367,00. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan perkantoran	1.126.604.574	711.411.772	58,36
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.398.000	23.846.500	(68,98)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	125.880.000	183.336.000	(31,34)
Belanja Barang Operasional Lainnya	276.851.978	390.520.693	(29,11)
Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19 (521131)	-	36.712.970	(100,00)
Belanja Bahan	2.258.284.515	1.220.755.056	84,99
Belanja Honor Output Kegiatan	3.138.887.000	3.570.800.000	(12,10)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.283.851.858	2.020.717.974	13,02
Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi	3.768.750	33.071.500	(88,60)
Belanja Langganan Listrik	228.862.967	178.995.768	27,86
Belanja Langganan Telepon	21.552.155	15.220.874	41,60
Belanja Langganan Daya dan Jasa lainnya	82.079.849	89.948.963	(8,75)
Belanja Sewa	190.315.000	85.322.500	123,05
Belanja Jasa Profesi	65.600.000	77.200.000	(15,03)
Belanja Jasa Lainnya	60.584.200	73.444.500	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	664.215.163	1.312.554.663	(49,40)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326.436.865	337.739.952	(3,35)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	196.648.427	292.655.313	(32,81)
Belanja Perjalanan Biasa	2.115.377.161	1.769.902.417	19,52
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.480.000	714.952.000	(96,58)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.348.700.745	4.450.000	-
Jumlah	14.546.379.207	13.143.559.415	10,67
Pengembalian Belanja	3.396.840	-114.900	2.856,34
Jumlah Netto	14.542.982.367	13.143.444.515	10,65

Terdapat Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya senilai Rp3.396.840,00 yaitu:

- Pengembalian Belanja Bahan senilai Rp2.310.000.00.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.086.840.00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal

Rp651.697.790.000,
00

Dalam Tahun 2024 Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2024 terdapat Belanja Modal yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp651.697.790,00 . Belanja Modal sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp452.587.457,00
- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp199.110.333,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.0 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan
Mesin
Rp452.587.457,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp452.587.457,00 dan Rp511.425.983,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp452.587.457,00, terdiri atas :

- Pengadaan AC senilai Rp91.375.000,00
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Layanan Publik senilai Rp132.150.000,00
- Pengadaan Meubelair senilai Rp40.257.000,00
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Layanan Pelatihan senilai Rp188.805.457,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp199.110.333.00*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp199.110.333,00. Terdapat Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, yaitu Renovasi Gedung Pendidikan Permanen senilai Rp199.110.333,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.0.00.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal
Lainnya Rp.0*

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0.00

B.6 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0.00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0.00 Saldo Kas ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Kas di bendahara pengeluaran TUP	-	-
Jumlah	-	-

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.4. Piutang PNB

Piutang PNB

Rp29.441.441,00

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah senilai Rp29.441.441,00 dan Rp16.492.810,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Bukan Pajak	29.441.441	16.492.810
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	29.441.441	16.492.810

Piutang Bukan Pajak senilai Rp29.411.441,00, terdiri atas:

- Pengembalian kelebihan Bayar uang Makan bulan Desember 2024 Pegawai dan Penyuluh Perikanan senilai Rp15.892.200,00.
- Pengembalian Kelebihan Bayar Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 Pegawai dan Penyuluh Perikanan senilai Rp13.549.241,00.

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas)

bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lainnya
(Rp147.207,00)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada Satuan Kerja Balai Pelatihan dan penyuluhan Perikanan Bitung senilai (Rp147.207,00).

C.8. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp.0 dan Rp.0 Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp.0,00.

C.10. Persediaan

Persediaan
Rp344.000,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp344.000,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	344.000	104.960
Bahan Baku	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	344.000	104.960

Nilai Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp344.000,00, sebagai berikut :

- Amplop senilai Rp344.000,00

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
TP/TGR
Rp0.00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0.00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember

2024 adalah masing-masing senilai Rp.0 Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0.00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14. Tanah

Tanah
Rp47.242.271.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp47.242.271.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	47.242.271.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Jumlah	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	47.242.271.000

Rincian Kepemilikan Tanah pada Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas/ m2	Lokasi	Nilai
1	70.000	Jl. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua	24.421.147.000
2	14.390	Jl. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua	6.444.986.000
3	25.400	Jl. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua	11.376.138.000
4			-
Jumlah			42.242.271.000

Ketiga Tanah ini telah dikeluarkan Penetapan Status Penggunaan BMN pada kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nomor :133/KM.6/WKN.16/2017 tanggal 28 November 2017.

C.15. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp21.579.433.273,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp21.579.433.273,00 dan Rp21.133.865.816,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	21.133.865.816
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	0
Pembelian	452.587.457
Koreksi tambah	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Jumlah	21.586.453.273
Mutasi Kurang	-
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstrakomtabel	7.020.000
Saldo per 31 Desember 2024	21.579.433.273
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	20.483.475.854
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.095.957.419

Dalam Peralatan dan Mesin terdapat pembelian senilai Rp452.587.457,00, terdiri atas :

- Pengadaan AC senilai Rp91.375.000,00
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendukung Layanan Publik senilai Rp132.150.000,00

- Pengadaan Meubelair senilai Rp40.257.000,00

Pada Peralatan dan mesin Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yang sudah dilakukan Penetapan Status senilai Rp43.229.003.649,00, dan belum ditetapkan status penggunaannya senilai Rp263.782.000,00.

C.16. Gedung dan Bangunan

Realisasi Gedung dan Bangunan
Rp20.555.038.695,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp20.555.038.695,00 dan senilai Rp19.887.744.362,00 .

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada laporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	19.887.744.362
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	-
Penerimaan Aset	667.297.333
Pengembangan Nilai Aset	-
Jumlah Mutasi Tambah	20.555.041.695
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/ Kuantitas	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2024	20.555.041.695
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(4.102.351.629)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	16.452.690.066

Realisasi pada Gedung dan Bangunan senilai Rp 667.297.333,00 sebagai berikut :

- Hibah masuk berupa 7 unit rumah negara dari pegawai senilai Rp468.184.000,00
- Pengembangan Nilai Gedung pendidikan Permanen senilai Rp199.110.333,00

Pada Gedung dan Bangunan Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Bitung yang sudah dilakukan Penetapan Status senilai Rp19.887.744.362,00.

C.17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Rp24.548.036.500,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp24.548.036.500,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	24.548.036.500
Mutasi tambah:	
Koreksi Kesalahan input IP (Jalan dan Jembatan)	0
Koreksi Kesalahan input IP (Irigasi)	0
Saldo Awal (Irigasi)	0
Jumlah	24.548.036.500
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	24.548.036.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-21.581.809.794
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.966.226.706

Pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan senilai Rp2.881.486.500,00.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp63.652.000,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah Rp63.652.000,00.

Aset ini meliputi :

- Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung senilai Rp63.652.000,00, yaitu:
 - Buku Rp.54.652.000,00
 - Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen Rp.9.000.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31

Desember 2024 senilai Rp0.00.

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp46.940.775.000, 00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah (Rp46.940.775.000,00) dan (Rp44.295.066.313,00).

Akumulasi Penyusutan ini meliputi :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp20.483.475.854,00
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp4.102.351.629,00
3. Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Rp21.924.162.589,00
4. Akumulasi Penyusutan Irigasi Rp298.577.903,00
5. Akumulasi Penyusutan Jaringan Rp132.207.025,00.

C.21. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp0,00*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0,00*

C.22. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	425.855.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghentian aset dari penggunaan	(425.855.000)
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp0,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah (Rp0,00) dan (Rp0,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.24. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan

Pihak Ketiga
Rp22.792.396,00.

2023 senilai Rp22.792.396.00 dan Rp25.797.270,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang masih Harus Dibayar	590.964	Belanja langganan Telepon
Beban barang yang masih harus dibayar	18.010.072	Belanja langganan Listrik
Beban barang yang masih harus dibayar	4.191.360	Belanja langganan Internet
Jumlah	22.792.396	

Utang yang belum
ditagihkan Rp0,00

C.26. Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan pada Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0.00.

Pendapatan yang
Ditangguhkan
Rp0,00

C.27. Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBK, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2024.

Pendapatan
Diterima di
Muka Rp.0

C.28. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0.00 dan Rp0.00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.29. Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0.00*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0,00, Beban ini merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Jumlah	-	

C.30. Ekuitas

*Ekuitas
Rp67.054.502.306,00*

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp67.054.502.306,00 dan Rp68.603.908.417,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp551.156.607,00*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp551.156.607,00 dan Rp312.567.661,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	182.696.000	-
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	2.970.500	-
Pend sewa Tanah, gedung bangunan	48.850.107	10.029.789
PendapatanPengunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	78.890.000	33.060.000
Pendapatan Biaya Pendidikan	-	-
Pedapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	237.750.000	-
JUMLAH	551.156.607	43.089.789

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 senilai Rp551.156.607,00 pada Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yaitu :

▪ Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp182.696.000,00, sebagai berikut;

- Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa penjualan udang vaname senilai Rp13.640.000,00
- Hasil sampling kegiatan workshop budidaya berupa panen ikan lele senilai Rp2.700.000,00
- Hasil praktek budidaya Lele senilai Rp600.000,00
- Hasil praktek budidaya Lele senilai Rp600.000,00
- Hasil sampling kegiatan workshop budidaya berupa panen ikan lele senilai Rp126.000,00

- Hasil sampling kegiatan workshop budidaya berupa penjualan ikan lele senilai Rp30.000,00
 - Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa panen udang vaname senilai Rp71.500.000,00
 - Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa panen udang vaname senilai Rp34.265.000,00
 - Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa panen udang vaname senilai Rp56.430.000,00
 - Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa panen udang vaname senilai Rp2.805.000,00
- **Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp48.850.107,00, sebagai berikut:**
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Januari 2024 senilai Rp1.549.548,00
 - Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Februari 2024 senilai Rp1.549.548,00
 - Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Maret 2024 senilai Rp1.549.548,00
 - Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan April 2024 senilai Rp1.549.548,00
 - Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Mei 2024 senilai Rp1.549.548,00
 - Sewa Tanah pemerintah (untuk Food Court) senilai Rp654.000,00
 - Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Juni 2024 senilai Rp1.549.548,00
 - Pembayaran kekurangan bayar sewa penggunaan rumah negara (rumah dinas) an. Ahmad Ridloudin, dkk senilai Rp8.478.121,00
 - Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Juli 2024 senilai Rp1.549.548,00
 - Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan

Agustus 2024 senilai Rp3.060.438,00

- Sewa Koperasi tahun 2024 dengan bukti setor Billing no. 820240820738463 tanggal 20 Agustus 2024 senilai Rp6.270.625,000
- Kekurangan bayar sewa koperasi dengan bukti setor Billing no. 820240822094862 tanggal 22 Agustus 2024 senilai Rp3.762.375,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan September 2024 senilai Rp2.053.178,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Oktober 2024 senilai Rp2.053.178,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan November 2024 senilai Rp2.053.178,00
- Sewa Rumah Dinas untuk 8 (delapan) pegawai lewat potongan langsung KPPN(Gaji Induk) bulan Desember 2024 senilai Rp2.053.178,00
- Sewa ruang pertemuan dan kamar asrama kegiatan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Bitung dan Kab. Minahasa Utara senilai Rp7.565.000,00

Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp78.890.000,00, sebagai berikut :

- Sewa asrama kegiatan rapat kerja Hidayatullah prov. Sulut tanggal 28 s.d. 30 Januari 2024 senilai 4.800.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan rapat kerja Hidayatullah prov. Sulut tanggal 28 s.d. 30 Januari 2024 senilai Rp500.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung senilai Rp325.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 18 Januari 2024 senilai Rp125.000,00

- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 24 Januari 2024 senilai Rp135.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 28 Januari 2024 senilai Rp45.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 30 Januari 2024 senilai Rp100.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan pelatihan BST F tingkat II tanggal 5 s.d. 7 Februari 2024 senilai Rp 750.000,00
- Sewa ruang pertemuan untuk kegiatan masyarakat tanggal 14 Februari 2024 senilai Rp1.000.000
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 1 Februari 2024 senilai Rp150.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 2 Februari 2024 senilai Rp250.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 3 Februari 2024 senilai Rp50.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 4 Februari 2024 senilai Rp100.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 6 Februari 2024 senilai Rp40.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 9 Februari 2024 senilai Rp100.000,00

- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 10 Februari 2024 senilai Rp80.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 12 Februari 2024 senilai Rp65.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 14 Februari 2024 senilai Rp75.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 17 Februari 2024 senilai Rp100.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 22 Februari 2024 senilai Rp105.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 24 Februari 2024 senilai Rp200.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 3 Maret 2024 senilai Rp195.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 4 Maret 2024 senilai Rp20.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 6 Maret 2024 senilai Rp25.000,00
- Karcis masuk pengunjung Eduwisata Bahari BPPP Bitung tanggal 9 Maret 2024 senilai Rp125.000,00
- Sewa asrama orang tua Taruna Poltek KP Bitung senilai Rp800.000,00
- Sewa asrama kegiatan Excellent Servant Camp 2024 GPI Kingdom Living Community senilai Rp9.600.000,00
- Sewa aula kegiatan Excellent Servant Camp 2024 GPI Kingdom Living Community senilai

Rp1.000.000,00

- Sewa asrama mahasiswa prodi Agrobisnis perikanan FPIK UNSRAT Manado tanggal 22 Mei 2024 senilai Rp4.000.000,
- Sewa asrama masyarakat umum tanggal 11 s.d. 13 Mei 2024 senilai Rp4.000.000,00
- Sewa kamar asrama untuk seleksi PentaruPoltek KP Bitung tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024 senilai Rp640.000,00
- Sewa kamar asrama untuk seleksi PentaruPoltek KP Bitung senilai Rp1.840.000,00
- Sewa aula kegiatan Bible Camp remaja jemaat Sentrum bitung senilai Rp1.000.000,00
- Sewa asrama kegiatan Bible Camp Remaja Jemaat Sentrum Bitung tanggal Rp4.000.000,00
- Sewa aula kegiatan Pelatihan offline Kab/Kota HAM Bitung Tgl. 3-5 Juli 2024 senilai Rp3.000.000,00
- Sewa asrama kegiatan Pelatihan offline Kab/Kota HAM Bitung Tgl. 3 Juli 2024 senilai Rp320.000,00
- Sewa asrama kegiatan Pelatihan offline Kab/Kota HAM Bitung Tgl. 3-5 Juli 2024 senilai Rp2.720.000,00
- Sewa asrama orang tua calon taruna Poltek KP Bitung Tgl 15 Juli 2024 (10 org x Rp. 80.000) senilai Rp800.000,00
- Sewa asrama penerimaan calon taruna Poltek KP Bitung Tgl 15 Juli 2024 (23 org x Rp40.000,00) senilai Rp920.000,00
- Sewa asrama Taruna Poltek KP Bitung tanggal 19 sd 24 Juli 2024 senilai Rp 800.000,00
- Sewa asrama Taruna Poltek KP Bitung tanggal 20 sd 24 Juli 2024 senilai Rp 160.000,00

- Sewa asrama Taruna Poltek KP Bitung tanggal 21 sd 24 Juli 2024 senilai Rp 120.000,00
- Sewa asrama Taruna Poltek KP Bitung tanggal 22 sd 24 Juli 2024 senilai Rp 80.000,00
- Sewa asrama pelatihan Festival HAM tanggal 25 sd 29 Juli 2024 senilai Rp7.680.000,00
- Sewa aula pelatihan Festival HAM senilai Rp3.000.000,00
- Sewa kamar asrama untuk 10 orang pendata Tgl. 31 Juli sd 2 Agustus 2024 (10 org x 3 hr x Rp. 80.000) senilai Rp2.400.000,00
- Sewa ruang kelas dan asrama untuk kegiatan pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan di BPPP Bitung kerjasama dengan Diskan Kab. Mimika senilai Rp3.900.000,00
- Sewa kamar asrama untuk 7 orang tanggal 2 September 2024 senilai Rp 560.000,00
- Sewa kamar asrama peserta pelat. Dan sertifikasi pembenihan ikan di BPPP Bitung kerjasama dgn Polnustar Tgl. 17 sd 19 September 2024 (5 org (siswa) senilai Rp600.000,00
- Sewa kamar asrama peserta pelat. Dan sertifikasi pembenihan ikan di BPPP Bitung kerjasama dgn Polnustar Tgl. 17 sd 19 September 2024 (4 org (dosen) senilai Rp960.000,00
- Sewa ruang kelas peserta pelat. Dan sertifikasi pembenihan ikan di BPPP Bitung kerjasama dgn Polnustar Tgl. 17 sd 19 September 2024 senilai Rp1.000.000,00
- Sewa ruang kelas kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan Mahasiswa Politeknik Nusa Utara Tgl. 7 sd 10 Oktober 2024 senilai Rp 750.000,00

- Sewa kamar asrama kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan Mahasiswa Politeknik Nusa Utara Tgl. 7 sd 10 Oktober 2024 senilai Rp1.440.000,00
- Sewa kamar asrama kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan Mahasiswa Politeknik Nusa Utara Tgl. 7 sd 10 Oktober 2024 (1 orang dosen) senilai Rp240.000,00
- Sewa ruang pertemuan / aula kegiatan field trip siswa lower class SD Citra Kasih Manado Tgl. 20 November 2024 senilai Rp1.000.000,00
- Sewa ruang pertemuan / aula kegiatan field trip siswa lower class SD Citra Kasih Manado Tgl. 21 November 2024 senilai Rp1.000.000,00
- Sewa asrama kegiatan pelatihan BSTF sebanyak 30 org Tgl 2-6 Des 2024 senilai Rp9.600.000,00
- Sewa ruang kelas kegiatan pelatihan BSTF Tgl. 3-5 Des 2024 senilai Rp1.500.000,00

Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan senilai Rp237.750,00, sebagai berikut :

- Ujian upgrading ankapin/ atkapin III senilai 13.650.000,00
- Diklat Upgrading SKK 60 Mil ankapin/ atkapin II senilai Rp28.700.000,00
- Pelatihan BST Fisheries tingkat II di Minahasa Tenggara tanggal 14 s.d. 16 Mei 2024 senilai Rp14.400.000,00
- Biaya pelatihan BST Fisherie tingkat II senilai Rp1.800.000,00
- Biaya pelatihan BST Fisherie tingkat II senilai Rp16.200.000,00
- Pelatihan BST Fisheries tingkat II di BPPP Bitung

tanggal 5 s.d. 7 Februari 2024 senilai Rp18.000.000,00

- Pelatihan BST Fisheries tingkat II di Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 14 s.d. 16 Mei 2024 senilai Rp14.400.000,00
- Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran produk hasil perikanan di BPPP Bitung kerjasama dengan Diskan Kabupaten Mimika senilai Rp9.900.000,00
- Pelatihan Pembenihan Ikan di BPPP Bitung kerjasama dengan Politeknik Negeri Nusa Utara tanggal 17 sd 18 September 2024 senilai Rp5.940.000,00
- Uji Kompetensi Pelatihan Pembenihan Ikan di BPPP Bitung kerjasama dengan Politeknik Negeri Nusa Utara tanggal 19 September 2024 senilai Rp4.770.000,00
- Uji Kompetensi Pelatihan Pembenihan Ikan di BPPP Bitung kerjasama dengan Politeknik Negeri Nusa Utara tanggal 19 September 2024 senilai Rp4.770.000,00
- Sertifikasi/ TUK Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan mahasiswa politeknik Nusa Utara Rp6.360.000,00
- Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pengolahan Hasil Perikanan mahasiswa Politeknik Nusa Utara senilai Rp11.880.000,00
- Kegiatan Pelatihan BSTF Tgl. 7 sd 9 November 2024 senilai Rp7.800.000,00
- Pelatihan upgrading SKK 60 Mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 22 orang Tgl. 11 sd 14 November 2024 senilai Rp18.040.000,00
- Ujian upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 22 orang senilai Rp8.580.000,00

- Pelatihan upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 6 org Tgl. 11 - 14 Nov. 2024 senilai Rp4.920.000,00
- Ujian upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 6 org senilai Rp2.340.000,00
- Pelatihan upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 4 org senilai Rp3.280.000,00
- Ujian upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III sebanyak 4 org senilai Rp1.560.000,00
- Kegiatan Pelatihan BSTF II untuk 23 orang Tgl. 18 sd 20 November 2024 senilai Rp13.800.000,00
- Pelatihan upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III untuk 23 orang Tgl. 21 sd 23 November 2024 senilai Rp18.860.000,00
- Biaya ujian upgrading SKK 60 mil ke ankapin / atkapin III untuk 23 orang Tgl. 24 November 2024 senilai Rp8.970.000,00
- Kegiatan Pelatihan BSTF II untuk 30 orang Tgl. 3 - 5 Desember 2024 senilai Rp18.000.000,00

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya senilai Rp2.970.500,00, sebagai berikut;

- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa Bakso Ikan Tuna senilai Rp52.500,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa Bakso Ikan Tuna senilai Rp410.000,00
- Hasil penjualan pempek senilai Rp400.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa snack rumput laut senilai Rp49.500,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa pempek senilai Rp250.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop Pengolahan berupa olahan mie rumput laut senilai

Rp150.000,00

- Hasil samping kegiatan workshop Pengolahan berupa pempek telur senilai Rp350.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa bakso ikan senilai Rp35.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan mie rumput laut senilai Rp60.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan bakso ikan senilai Rp35.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan mie rumput laut senilai Rp30.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan bakso ikan tuna senilai Rp52.500,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan bakso ikan senilai Rp52.500,00
- Hasil samping kegiatan WS PHP berupa pempek ikan senilai Rp75.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa olahan bakso ikan senilai Rp35.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa risol tuna senilai Rp99.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa bakso ikan senilai Rp42.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa nugget ikan senilai Rp38.000,00
- Hasil samping kegiatan workshop PHP berupa bakso ikan senilai Rp175.000,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 senilai Rp47.793.113.950,00 dan Rp42.745.456.127,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk

uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Beban Gaji	14.093.320.600	13.340.284.980
Beban Pembulatan Gaji PNS	213.931	198.937
Beban Tunj. Suami/ istri PNS	933.919.810	873.884.390
Beban Tunj. Anak PNS	275.572.862	261.634.662
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.558.878.000	2.595.802.000
Beban Tunj. PPh PNS	164.858.908	71.101.202
Beban Tunj. Beras PNS	725.069.040	749.112.480
Beban Uang Makan PNS	2.224.524.800	2.357.682.000
Beban Tunj. Umum PNS	49.700.000	57.605.000
Beban Pegawai		
Beban Gaji Pokok PPPK	2.122.955.600	1.153.968.500
Beban Pembulatan Gaji PPPK	41.586	28.585
Beban Tunj. Suami/ istri PPPK	130.796.720	70.899.350
Beban Tunj. Anak PPPK	34.980.128	16.256.420
Beban Tunj. Fungsional PPPK	342.360.000	210.060.000
Beban Tunj. Beras PPPK	117.537.660	65.322.840
Beban Uang Makan PPPK	373.683.000	228.697.000
Beban Uang Lembur		
Beban Tunjangan Profesi Dosen		
Beban Pegawai (Tunj Khusus/ kegiatan)	20.839.692.307	18.999.771.611
Beban Pegawai (Tunj Khusus/ kegiatan/kinerja)	2.784.818.863	1.667.946.170
Jumlah	47.798.123.815	42.745.456.127
Pengembalian Belanja	(5.009.865)	
Jumlah	47.793.113.950	42.745.456.127

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp. 3.529.710,00*

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp3.529.710,00 dan Rp34.938.190,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang

dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.529.710	34.938.190	(89,90)
Beban Persediaan Bahan utk pemeliharaan			-
Beban Persediaan Suku Cadang			-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	
Beban Persediaan Lainnya	-	-	
Jumlah	3.529.710	34.938.190	(89,90)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp9.861.437.222,00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp9.861.437.222,00 dan Rp8.687.330.017,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Beban Keperluan Perkantoran	1.126.604.574	711.411.772
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.398.000	23.846.500
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	125.880.000	183.336.000
Beban Barang Operasional Lainnya	276.851.978	390.405.793
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19		36.712.970
Beban Bahan	2.258.284.515	1.220.755.056
Beban Honor Output Kegiatan	3.138.887.000	3.570.800.000
Beban Barang Non Operasional lainnya	2.283.851.858	2.020.717.974
Beban Langganan Listrik	226.468.000	187.632.168
Beban Langganan Telepon	20.949.748	15.040.741
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	82.072.349	90.704.043
Beban Sewa	190.315.000	85.322.500
Beban Jasa Profesi	65.600.000	77.200.000
Beban Jasa Lainnya	60.584.200	73.444.500
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan mesin	-	-
Jumlah	9.863.747.222	8.687.330.017
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-2310000	-114900
Jumlah	9.861.437.222	8.687.215.117

Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya senilai Rp2.310.000,00 yaitu:

- Pengembalian Belanja Bahan senilai Rp2.310.000.00.

Beban Pemeliharaan
Rp1.187.300.455,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp609.508.322,00 dan Rp864.037.687,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	664.215.163	1.312.554.663	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326.436.865	337.739.952	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	196.648.427	292.655.313	-
Jumlah	1.187.300.455	1.942.949.928	

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp3.500.474.676,00 dan Rp2.476.300.807,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.128.380.771	1.756.898.807	21,14
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.480.000	714.952.000	-96,58
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.348.700.745	4.450.000	
Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri	0	0	-
Jumlah	3.501.561.516	2.476.300.807	41,40
Pengembalian Bel. Perjadin Biasa	1.086.840	0	
Jumlah	3.500.474.676	2.476.300.807	41,36

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.641.026.847,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp2.641.026.847,00 dan Rp3.244.665.573,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	623.867.376	621.211.035	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	470.884.024	455.199.382	3
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.510.598.198	2.132.577.906	(29)
Beban Penyusutan Irigasi	24.722.487	24.722.488	
Beban Penyusutan Jaringan	10.954.762	10.954.762	
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Jumlah Penyusutan	2.641.026.847	3.244.665.573	-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp82.189,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp82.189,00 dan (Rp266.128).

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	82.189	-266.128	-130,88
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	-
Jumlah	82.189	-266.128	-130,88

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp24.411.710,00)*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	
Pendapatan dari keg. Non operasional lainnya	24.411.710	36.558.057	-33,22
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	24.411.710	36.558.057	

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp24.411.710,00, meliputi :

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp7.628.800,00, sebagai berikut :
 - Uang Makan bulan November 2023 an. Rian Hidayat Luhkan Kaltara senilai Rp770.000.00
 - Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang lalu atas Tunjangan Umum Muh. Fiqi Zulendra senilai Rp370.000,00
 - Pengembalian Kelebihan Bayar Tunjangan Kinerja bulan September 2022 sd Desember 2023 an. Adi Saputra senilai Rp6.488.800,00
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp16.782.910,00, sebagai Berikut:
 - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp13.003.610
 - Pengembalian Kelebihan Bayar pekerjaan pemeliharaan bangunan bengkel/ hangar permanen oleh CV. Carin Jaya senilai Rp2.675.700,00

- Pengembalian Kelebihan Bayar pekerjaan pemeliharaan gedung instalasi studio oleh Rp1.103.600,00

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp68.603.908.417,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp68.603.908.417,00 dan Rp71.400.509.781,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp63.157.164.250,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai (Rp63.157.164.250,00) dan (Rp58.782.248.796,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang menambah/ Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar.

Koreksi- koreksi ini berdasarkan pada :

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp0 dan Rp0.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi
(Rp0,00)

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai (Rp0,00 dan Rp0,00,).

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp11.701.840,00)

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai (Rp11.701.840,00) dan (Rp0,00).

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi mengalami pembentukan Jurnal Otomatis karena adanya hibah Langsung dari pegawai berupa 7 (tujuh) rumah menjadi rumah negara.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain
Rp17.446,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp17.446,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain terbentuk dari Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang lainnya atas Kelebihan Bayar Tunjangan di tahun 2023.

Transaksi Antar Entitas
Rp62.906.362.031,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp62.906.362.031,00 dan Rp55.984.971.628,00. Transaksi

antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Diterima dari Entitas Lain	(579.057.517)	-418.164.997
Ditagikan ke Entitas Lain	63.017.235.548	56.403.136.625
Transfer Masuk	-	
Transfer Keluar	-	
Pengesahan Hibah Langsung	468.184.000	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	
Jumlah	62.906.362.031	55.984.971.628

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 dan 2023, DDEL senilai (Rp579.057.517,00) sedangkan DKEL senilai Rp63.017.235.548,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1			-
3			-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31

Desember 2024 dn 2023 senilai Rp. 0,00 dan Rp0,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp67.054.502.306,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp67.054.502.306,00 dan Rp68.603.908.417,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Untuk Aset dan Persediaan telah dilaporkan melalui aplikasi SAKTI juga aplikasi SIMAN.
- Untuk Modul Pelaporan telah dilaporkan melalui Aplikasi SAKTI
- Satker BPPP Bitung melakukan Rekonsiliasi Data dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung melalui Om Span dan Aplikasi SAKTI
- Satker BPPP Bitung ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah UAKPPA-W

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Kegiatan pelatihan dilakukan oleh satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2024 dilakukan dalam sistem Luring.
- Temuan BPK terkait Geotagging tahun 2021 sudah ditindak lanjuti.
- Temuan BPK terkait kelebihan pembayaran belanja pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sudah ditindaklanjuti, yaitu pengembalian tunjangan fungsional April s.d. Desember 2023 dan Tunjangan Kinerja Sept 2023 an. Adi Saputra (Tugas Belajar) senilai Rp2.344.200 dan pengembalian pembayaran tunjangan Fungsional April 2023 Gaji THR 2023 dan Tunjangan Umum bulan Mei 2023 (Gaji 13 Tahun 2023) an Adi Saputra senilai Rp1.145.000.
- Terdapat Kurang saji senilai Rp3.489.200,00, dalam Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dikarenakan nilai tersebut tidak tercatat di aplikasi SAKTI karena disetor telah melewati jam penyetoran dan tercatat dalam Laporan PNBPN tahun 2024.